



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3511505, FAKSIMILE (021) 3511486, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : Und - 84 /PK/2017
Sifat : Segera
Hal : Undangan Workshop .

10 November 2017

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
(terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Tahun Anggaran 2018, kami bermaksud untuk menyelenggarakan **Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2018**. Tujuan penyelenggaraan workshop tersebut adalah agar: (1) peraturan bupati/walikota mengenai tata cara penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa dapat disusun dan ditetapkan secara tepat waktu, mengingat peraturan dimaksud merupakan salah satu syarat penyaluran Dana Desa; (2) penyampaian pokok-pokok yang perlu dimuat dalam peraturan bupati/walikota dimaksud agar selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan (3) pemberian asistensi penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa berdasarkan pagu Dana Desa pada APBN TA 2018.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta bantuan Saudara untuk menunjuk 3 (tiga) orang pejabat/pegawai dari unit yang menangani bidang keuangan, pemerintahan/pemberdayaan masyarakat desa, dan *legal drafting* peraturan daerah, agar dapat hadir pada workshop yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin-Selasa, 20-21 November 2017
(jadwal per Kabupaten/Kota terlampir)

Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya No.73-81, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, 10450

Penyelenggaraan workshop tersebut tidak dipungut biaya. Panitia menyediakan konsumsi selama kegiatan berlangsung, sedangkan akomodasi dan transportasi dibebankan kepada anggaran perjalanan dinas masing-masing daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Boediarso Teguh Widodo
NIP 19580823 198210 1 001

Jadwal Acara

Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2018

Hotel Acacia, Jalan Kramat Raya No.73-81, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, 10450

Waktu	Acara	PIC
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 08.45	Laporan Panitia	Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
08.45 – 09.30	<i>Keynote Speech</i> dan Pembukaan	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
09.30 – 09.40	<i>Coffee Break</i>	
Pemaparan Materi Secara Panel		
09.40 – 11.40	Materi I : Kebijakan Dana Desa TA 2018	Kemenkeu
	Materi II : Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pokok-Pokok Muatan Revisi Permendagri 113 Tahun 2014	Kemendagri
	Materi III : Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018	Kemendes dan PDT
11.40 – 12.45	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12.45 – 13.30	ISHOMA	
Peserta Dibagi ke Dalam Kelompok/Kelas		
13.30 – 15.00	Pokok Muatan Peraturan Bupati/Walikota dan Bimbingan Penghitungan Dana Desa	• Instruktur • Peserta membawa perlengkapan laptop
15.00 – 15.15	<i>Coffee Break</i>	
15.15 – 16.30	Lanjutan (Bimbingan Penghitungan Dana Desa)	• Instruktur • Peserta membawa perlengkapan laptop
16.30 – 17.00	Penutupan	Panitia

Mohon perhatian:

1. Untuk mendukung pelaksanaan acara, mohon dapat melakukan konfirmasi kehadiran melalui email ke subditdok.djpk@gmail.com atau telepon ke 021-3511505, Sdr. Dastam (0812 9055 594)
2. Panitia tidak menanggung transportasi dan akomodasi selama acara berlangsung.
3. Peserta workshop agar membawa laptop dan media pemindah data (*flashdisk*).

Lampiran

Nomor : Und-~~84~~ /PK/2017

Tanggal : ~~10~~ November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 21 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh	
1	Kab. Aceh Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Aceh Besar
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Aceh Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Aceh Singkil
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Aceh Tengah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Aceh Tenggara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Aceh Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Aceh Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Bireuen
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Pidie
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kab. Simeulue
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kota Banda Aceh
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
13	Kota Sabang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
14	Kota Langsa
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
15	Kota Lhokseumawe
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
16	Kab. Gayo Lues
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
17	Kab. Aceh Barat Daya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
18	Kab. Aceh Jaya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
19	Kab. Nagan Raya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
20	Kab. Aceh Tamiang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
21	Kab. Bener Meriah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
22	Kab. Pidie Jaya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
23	Kota Subulussalam
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Lampiran

Nomor : Und-~~81~~ /PK/2017

Tanggal : ~~10~~ November 2017

DAFTAR UNDANGAN

WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 21 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Riau	
1	Kab. Bengkalis
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Indragiri Hilir
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Indragiri Hulu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Kampar
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Kuantan Singingi
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Pelalawan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Rokan Hilir
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Rokan Hulu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Siak
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Kepulauan Meranti
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Kep. Riau	
1	Kab. Natuna
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Kepulauan Anambas
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Karimun
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Lingga
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Bintan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Banten	
1	Kab. Lebak
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Pandeglang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Serang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Tangerang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Lampiran

Nomor : Und-~~84~~ /PK/2017

Tanggal : 10 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 21 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Bali	
1	Kab. Badung
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Bangli
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Buleleng
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Gianyar
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Jembrana
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Karangasem
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Klungkung
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Tabanan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kota Denpasar
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur	
1	Kab. Berau
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Kutai Kartanegara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Kutai Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Kutai Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Paser
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Penajam Paser Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Mahakam Ulu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara	
1	Kab. Bulungan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Malinau
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Nunukan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Tana Tidung
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Provinsi Gorontalo	
1	Kab. Boalemo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Gorontalo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Pohuwato
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Bone Bolango
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Gorontalo Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Lampiran

Nomor : Und-~~84~~ /PK/2017

Tanggal : 10 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 21 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi NTT	
1	Kab. Alor
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Belu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Ende
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Flores Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Kupang
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Lembata
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Manggarai
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Ngada
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Sikka
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Sumba Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kab. Sumba Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
12	Kab. Timor Tengah Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
13	Kab. Timor Tengah Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
14	Kab. Rote Ndao
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
15	Kab. Manggarai Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
16	Kab. Nagekeo
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
17	Kab. Sumba Barat Daya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
18	Kab. Sumba Tengah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
19	Kab. Manggarai Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
20	Kab. Sabu Raijua
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
21	Kab. Malaka
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Lampiran

Nomor : Und-84 /PK/2017

Tanggal : 10 November 2017

DAFTAR UNDANGAN
WORKSHOP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TA 2017
TANGGAL 21 NOVEMBER 2017

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku	
1	Kab. Maluku Tenggara Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Maluku Tengah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Maluku Tenggara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Buru
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kota Ambon
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Seram Bagian Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kab. Seram Bagian Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Kepulauan Aru
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kota Tual
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
10	Kab. Maluku Barat Daya
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
11	Kab. Buru Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

Provinsi Sulawesi Barat	
1	Kab. Majene
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Mamuju
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Polewali Mandar
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Mamasa
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Mamuju Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Mamuju Tengah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum

No.	Kabupaten/Kota
Provinsi Maluku Utara	
1	Kab. Halmahera Tengah
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
2	Kab. Halmahera Barat
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
3	Kab. Halmahera Timur
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
4	Kab. Halmahera Selatan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
5	Kab. Halmahera Utara
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
6	Kab. Kepulauan Sula
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
7	Kota Tidore Kepulauan
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
8	Kab. Pulau Morotai
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum
9	Kab. Pulau Taliabu
	a. Kepala DPPKAD
	b. Kepala DPMD
	c. Kepala Bagian Hukum